

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN ABSTRACT	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	20
D. Manfaat Penelitian Disertasi	21
E. Kerangka Konseptual	22
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	22
a. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	22
b. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres No 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	30
	liii
2. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
3. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50
4. Tindak Pidana Korupsi	54
5. Keuangan Negara.....	60
6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	64

	7. Pelayanan Publik.....	68
	F. Kajian Teori	73
	1. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama)	73
	2. <i>Middle Theory</i> (Teori Tengah)	87
	a. Teori Bekerjanya Hukum.....	87
	b. Teori Sistem Hukum	92
	3. <i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi).....	95
	a. Teori Hukum Pembangunan.....	95
	b. Teori Hukum Progresif	102
	c. Teori Kewenangan	105
	G. Kerangka Pemikiran.....	112
	H. Metode Penelitian	113
	I. Orisinalitas Penelitian/ Keaslian Penelitian.....	120
	J. Sistematika Penelitian	122
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	124
		liv
	A. Pengaturan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	124
	1. Pengaturan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebelum <i>E-Procurement</i>	124
	2. Pengaturan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setelah <i>E- Procurement</i>	135
	2.1 Pengaturan Sanggahan Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya.	135
	2.2 Pengaturan Sanggah Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	149

BARANG/JASA PEMERINTAH	158
A. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebelum Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	158
1. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Sesuai Keppres No 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	158
	iv
2. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Sesuai Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya.....	182
B. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setelah Pelaksanaan <i>E- Procurement</i>	206
1. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Sesuai Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya.....	206
2. Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	235
C. Pergeseran Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	243
D. Faktor-Faktor Penyebab Pengaturan dan Pelaksanaan Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Belum Berkeadilan.....	256

BAB IV	KELEMAHAN–KELEMAHAN	DAN	KENDALA-	
	KENDALA	PENGATURAN	SANGGAH	ATAS
	PENETAPAN	PEMENANG	TENDER	PENGADAAN
	BARANG/JASA PEMERINTAH			269
				lvi
	A. Kelemahan Pengaturan Sanggah Atas Penetapan Pemenang			
	Tender			269
	1. Faktor Regulasi			269
	2. Faktor Sumber Daya Manusia			276
	3. Faktor Budaya Hukum			286
	B. Kendala-Kendala Pengaturan Sanggah Atas Penetapan			
	Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			294
	1. Lemahnya Pengaturan Sanggah.....			294
	2. Kurangnya Sosialisasi Aturan Pendukung Pengadaan			
	Barang/Jasa Pemerintah			298
	3. Lemahnya Penguasaan Pengaturan dan Proses			
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			299
BAB V	REKONSTRUKSI PENGATURAN SANGGAH YANG IDEAL			
	ATAS PENETAPAN PEMENANG TENDER PENGADAAN			
	BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERBASIS NILAI			
	KEADILAN.....			302
	A. Penegakan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			302
	1. Sanksi Hukum Pidana.....			302
	2. Sanksi Hukum Perdata			309
	3. Sanksi Hukum Administrasi Negara			315
	B. Pelaksanaan Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa			
	Pemerintah di Berbagai Negara			324
	1. Korea Selatan.....			324
	2. Malaysia			329
	3. Uni Eropa			333
				lvii

	C. Rekonstruksi Pengaturan Sanggah Yang Ideal Atas Penetapan Pemenang Tennder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Nilai Keadilan	345
	1. Rekonstruksi Nilai	350
	2. Rekonstruksi Hukum	367
	Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	382
	1. Sanggah Kualifikasi.....	383
	2. Sanggah Atas Penetapan Pemenang Tender	385
	3. Sanggah Banding	386
BAB VI	PENUTUP	390
	A. Simpulan.....	390
	B. Saran	392
	C. Implikasi Kajian.....	394
	Daftar Pustaka	397
	Lampiran-Lampiran.....	409
	D. Konsep Pengaturan Sanggah Yang Ideal Atas Penetapan Pemenang Tennder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	